

Penyerahan Agenda Politik Pemerintah: Pengelolaan Kebijakan Smart Kampung Berbasis Society Kabupaten Banyuwangi

Nabil Lintang Pamungkas¹

¹ Mahasiswa Magister Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Abstract. The Banyuwangi District Government issued a technology-based Smart Kampung policy aimed at increasing the effectiveness of public services and tackling poverty issues. Based on the concepts of social capital and community participation, this article tries to explain the extent of community involvement, evaluates Smart Kampung policies in more depth and offers alternative policies that should be implemented. Seeing the social conditions that are plural, of course these policies can not be uniformed, the need for policies based on the community itself. Data shows that the application of this policy cannot reach areas in rural and coastal areas. Many people still do not feel the presence of Smart Kampung policy. Procedurally, this policy solves many problems in the form of procurement of wifi goods, as well as the management of goods that are not maximized by the government. The results showed that community involvement in the policy was quite low, the community was only involved in the planning process but in the implementation of the community's policy it did not actively participate. And the availability of social groups is not fully involved, many consider that the policy only focuses on technology-based administrative issues and doesn't understand the purpose of the establishment of the policy. The author assumes that the government needs to utilize and improve human resource issues through mapping of existing social groups and providing an alternative offer in responding to these problems.

Keywords: social capital; smart kampung policy; social groups; society-based policy.

Abstrak. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan Smart Kampung yang berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta menanggulangi persoalan kemiskinan. Berdasarkan konsep modal sosial dan partisipasi masyarakat, artikel ini mencoba memaparkan sejauh mana keterlibatan masyarakat, mengevaluasi kebijakan Smart Kampung secara lebih mendalam serta menawarkan bagaimana alternatif kebijakan yang seharusnya dilakukan. Melihat kondisi sosial yang majemuk, tentu kebijakan tersebut tidak dapat diseragamkan, perlunya kebijakan yang berbasis pada masyarakat itu sendiri. Data menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini tidak dapat menjangkau daerah di wilayah pedesaan dan pesisir. Banyaknya masyarakat yang masih tidak merasakan akan hadirnya kebijakan Smart Kampung. Secara prosedur, kebijakan ini menyimpan banyak persoalan berupa pengadaan barang wifi, serta pengelolaan barang yang tidak dimaksimalkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan tersebut terbilang cukup rendah, masyarakat hanya terlibat dalam proses perencanaan namun dalam pelaksanaan kebijakan masyarakat justru tidak berpartisipasi secara aktif. Serta ketersediaan kelompok sosial tidak dilibatkan sepenuhnya, banyak yang menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya fokus pada persoalan administrasi berbasis teknologi dan tidak mengerti tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut. Penulis beranggapan pemerintah perlu memanfaatkan serta meningkatkan persoalan sumber daya manusia melalui pemetaan terhadap kelompok sosial yang ada serta memberikan sebuah tawaran alternatif dalam menanggapi persoalan tersebut.

Kata Kunci: modal sosial; kebijakan smart kampung; kelompok sosial; kebijakan berbasis society.

Received: 05/01/2020

Revised: 26/02/2020

Accepted: 02/03/2020

Korespondensi:

Mahasiswa Magister Departemen Politik dan Pemerintahan,
Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia No. 1, Yogyakarta 55281

Email: pamungkasnabil31@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebijakan publik yang dihadirkan oleh negara selalu mempunyai paradigma berpikir yang baku, kebijakan hanya dirumuskan hanya untuk kepentingan negara, bukan didasarkan pada kepentingan kolektif masyarakat. Hal ini justru menjadi persoalan yang cukup serius bagi sebuah negara itu sendiri, legitimasi yang dibangun negara melalui kebijakan secara realitasnya justru tidak hadir dalam jati diri masyarakat. Dalam waktu dekat ini, pemerintah bekerja keras untuk menghasilkan produk kebijakan sesuai dengan prinsip yang didasarkan pada aspek efektivitas. Artinya, pemerintah berupaya menciptakan sebuah pelayanan yang sangat mudah bagi masyarakat. Dengan berkembangnya jaman yang berbasis pada teknologi, pemerintah berusaha menyesuaikan diri dengan hal tersebut. Dengan melibatkan aspek teknologi yang telah berkembang, hal ini diharapkan sebagai sebuah terobosan kebijakan baru bagi pemerintah untuk memudahkan akses pelayanan terhadap masyarakat. Namun secara prinsip, aspek efektivitas terhadap pelayanan publik perlu didiskusikan kembali dalam pelaksanaannya. Prinsip efektivitas dalam birokrasi pemerintah secara sederhana lebih memudahkan birokrat-birokrat pemerintah dalam mengemban tugasnya, hal ini justru bertolak-belakang dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Di samping itu, tidak hanya bertumpu pada aspek pelayanan yang efektif, kendala yang menjadi permasalahan serius hari ini adalah stagnasi kemiskinan di level masyarakat. Tujuan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan cenderung tidak berhasil karena angka kemiskinan akhir-akhir ini cenderung bersifat stabil. Kemiskinan didefenisikan secara sepihak oleh pemerintah, namun tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Pemerintah melalui kebijakan yang berbasis pada teknologi berupaya untuk meningkatkan aspek kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Menciptakan pelayanan yang bersifat efisien dan efektivitas, dalam hal ini pemerintah mencoba melakukan terobosan kebijakan yang berbasis teknologi demi menghemat atau memangkas waktu yang terbuang sia-sia. Hal ini merupakan salah satu usaha bersifat positif yang dianggap oleh pemerintah, karena masyarakat tidak perlu lagi meluangkan waktu yang berbelit-belit untuk urusan pelayanan administratif. Pelayanan publik yang

berbasis teknologi telah diterapkan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Banyuwangi dengan pelayanan publik andalannya yakni program Smart Kampung. Program ini berdiri atas inisiatif dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Program ini menggunakan istilah Kampung, meskipun secara konsep memiliki kesamaan dengan program Smart City yang diterapkan di daerah-daerah lain. Program ini merupakan desain dari pembangunan daerah yang bersifat modern, model program yang dibangun berbasis pada teknologi untuk pelayanan publik terhadap masyarakat dengan menggunakan pendekatan teknologi (Hollands, 2008). Kebijakan tersebut dinilai oleh pemerintah sebagai terobosan terhadap persoalan masyarakat Banyuwangi. Persoalan yang sering terjadi karena kondisi geografis Banyuwangi yang cukup luas dengan daerah pedesaan. Di mana jarak tempuh antar desa maupun kecamatan sangat berjauhan, hal ini berdampak pada proses pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Dengan kondisi seperti itu, Pemda Banyuwangi mewujudkannya dalam bentuk kebijakan berbasis teknologi. Kebijakan tersebut bersifat terpusat, dengan melibatkan pemerintah desa, harapannya segala urusan administratif masyarakat dapat diselesaikan di level desa. Sejak awal kepemimpinan Azwar Anas, upaya tersebut sebagai pengembangan reformasi birokrasi. Program terobosan yang dilakukan oleh Bupati Anas mencoba membedekan diri dengan program Smart City di daerah lain. Hal ini menurutnya, Banyuwangi bukan merupakan daerah perkotaan, karena hal ini berkaitan dengan mata pencaharian penduduk serta kondisi sosial masyarakat, yang itu semua disokong dengan bentuk peradaban yang bersifat pedesaan (Akmal, 2017).

Penulis melihat kebijakan tersebut menuai banyak persoalan, secara akademis, terdapat banyak literatur yang kurang memperhatikan bagaimana konsep Smart Kampung Banyuwangi perlu dievaluasi. Berbagai literatur telah menyebutkan bahwa kebijakan Smart Kampung perlu dievaluasi terus-menerus sehingga menciptakan kebijakan yang mampu menjangkau kepentingan masyarakat. Namun, persoalan tersebut tidak dijadikan sebagai pembahasan utama dalam berbagai literatur yang telah ada. Penelitian lainnya kebanyakan memfokuskan kajiannya terhadap cara pandang pemerintah dalam menerapkan kebijakan, bukan melihat sebaliknya, yakni apa manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Kedua, persoalan tujuan dari

kebijakan tersebut yang tidak menitikberatkan pada persoalan kemiskinan serta kebutuhan mendasar masyarakat. Berbagai aktor masyarakat banyak yang mengkritik penerapan dari kebijakan tersebut. Baginya, kebijakan ini tidak mendapatkan kebaruan terkait kondisi kontemporer yang terjadi di masyarakat, tujuan menyejahterahkan masyarakat justru tidak dihadirkan oleh pemerintah, kebijakan Smart Kampung hanya menitikberatkan pada aspek infrastruktur, penyediaan internet, serta display fisik yang menarik (Sodiqin, 2018). Padahal masih banyak pertanyaan yang muncul dari hadirnya kebijakan tersebut diantaranya, bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta keterlibatannya dalam kebijakan tersebut? Apakah kebijakan tersebut berjalan semestinya sesuai dengan tujuan awal terbentuknya kebijakan? Bagaimana seharusnya masyarakat terlibat dalam kebijakan tersebut? Serta apa saja yang perlu dievaluasi selama kebijakan tersebut berlangsung?

Sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan dengan pelaksanaan konsep Smart Kampung di Banyuwangi. Salah satunya penelitian yang membahas model akselerasi kebijakan Smart Kampung melalui perspektif pelayanan publik (Tree Setiawan, dkk., 2017). Dalam penelitiannya, ia menjelaskan kebijakan tersebut secara implementatif, proses pelaksanaannya serta bagaimana kerangka kerja pemerintah dalam menerapkan Smart Kampung. Temuannya terdapat empat variabel utama yang mendukung kebijakan tersebut; (1) kepemimpinan, (2) sumber daya manusia, (3) aplikasi, (4) jaringan. Variabel tersebut dianggapnya sebagai penyokong utama dalam menyukseskan kebijakan tersebut. Selaras dengan penelitian Mariyam (2017) yang mengkaji adanya integrasi antara sistem perencanaan di level kabupaten dengan anggaran di pemerintah desa. Dalam penelitiannya juga menjelaskan bagaimana Pemkab Banyuwangi melakukan display yang dapat menarik perhatian warga melalui renovasi, menyiapkan sarana teknologi, alokasi dana jaringan internet yang dialokasikan untuk pemerintah desa. Terdapat pula beberapa literatur yang membahas tentang bagaimana kebijakan dapat dievaluasi sedemikian rupa, sehingga menciptakan sebuah kebijakan terobosan yang mampu menengahi persoalan yang ada (Nugroho, 2014), serta kebijakan tersebut dapat berjalan secara bersamaan antara negara, pasar dan masyarakat (Indiahono, 2009). Terdapat literatur juga yang

membahas kebijakan yang berbasis baik pada negara maupun masyarakat, namun, seringkali hanya dijadikan sebagai agenda politik pemerintah itu sendiri (Mas'udi & Kurniawan, 2017; Haliim, 2018).

Pada akhirnya, penulis mencoba keluar dari narasi-narasi tersebut yang banyak menitikberatkan kesuksesan kebijakan Smart Kampung hanya dapat dilaksanakan oleh aparatur negara. Hal yang terpenting dari artikel ini adalah mencoba mengevaluasi kebijakan tersebut, karena minimnya literatur yang membahas bagaimana Smart Village perlu dikaji secara evaluatif. Serta di akhir, penulis mencoba menawarkan terobosan, bagaimana pemerintah seharusnya mempercayai kelompok sosial guna menciptakan rumusan kebijakannya secara mandiri. Karena itu, kebijakan yang sampai sekarang terlihat tidak dimaknai sebagai kebijakan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, masyarakat hanya cenderung sebagai objek kajian dari pemerintah untuk memuluskan kewajibannya. Penulis kali ini hendak mengisi kekosongan antara literatur yang telah dijelaskan di atas. Dengan melihat kebijakan tersebut secara substansif, serta meninjau kembali sejauh mana keterlibatan masyarakat secara aktif sebagai pengelola bukan sebagai penerima kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh Pemda Banyuwangi ini mengklaim bahwasanya program ini bersifat kearifan lokal, kebijakan ini dalam versi pemerintah berupaya untuk melindungi budaya-budaya lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Namun dibalik klaim itu semua, program ini juga masih menyimpan permasalahan yang tak kunjung selesai. Dari beberapa data awal terkait tulisan ini, terdapat masyarakat yang masih tidak mengerti secara jelas bagaimana pelayanan publik bekerja melalui pendekatan teknologi, hal ini seringkali dialami oleh warga Banyuwangi.

Perspektif kebijakan yang hanya dimaknai oleh negara menyebabkan definisi atas kebijakan terkait pemberdayaan justru dimaknai, dirumuskan maupun diimplementasikan dengan cara-cara yang bersifat top-down, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial yang ada. Banyak kelompok-kelompok sosial yang dibentuk oleh negara, namun negara cenderung membiarkan kelompok tersebut, namun aspek keberadaannya tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Justru pada akhirnya, definisi atas kebijakan sebagai pemberdayaan masyarakat cenderung

diabaikan, dan ini hanya memberi manfaat kepada salah satu pihak saja, yang itu berurusan terkait penyederhanaan dan efektivitas administrasi melalui kebijakan yang berbasis pada teknologi. Perlunya mengaktifkan kembali modal sosial yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut, modal sosial dibangun guna memahami persoalan ekonomi masyarakat, kebijakan yang bersifat partisipatoris, dan sebagai jaringan sosial yang saling terintegrasi (Uphoff & Esman, 1988).

TINJAUAN KONSEP

- Mengembangkan Modal Sosial

Dalam suatu kebijakan, penting untuk dilihat bagaimana logika yang terbangun dari suatu kebijakan tersebut sehingga menghasilkan dampak yang luas bagi seluruh masyarakat. Kebijakan ditujukan untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang menjadi persoalan utama di negara ini. Seringkali kita melihat bahwa kebijakan dirumuskan oleh suatu cara pandang yang hierarkis, maksudnya kebijakan cenderung bersifat administratif dan didominasi oleh aktor-aktor negara, masyarakat cenderung tidak diberi tempat atau diberikan akses politik dalam memberdayakan kehidupannya sendiri.

Sebagai gagasan alternatif dari persoalan tersebut, perlunya modal sosial yang kuat dalam merumuskan suatu kebijakan sehingga kebijakan tersebut bersifat jangka panjang dan kebermanfaatannya dirasakan oleh khalayak umum. Berbagai ilmuwan politik dalam melihat modal sosial memiliki pemaknaan yang berbeda-beda, salah satunya Putnam (1993), mengartikan modal sosial sebagai suatu jaringan koordinasi yang bersifat kolektif demi mencapai tujuan dari kelompok masyarakat itu sendiri. Sedangkan Fukuyama (2002), melihat modal sosial sebagai trust atau kepercayaan diantara masyarakat itu sendiri, kepercayaan harus bersifat radikal, dalam artian sesuatu yang telah melekat dan mengakar kuat dalam diri masyarakat. Apabila kepercayaan tersebut tidak dapat diwujudkan maka dampaknya akan menghasilkan modal sosial yang lemah. Literatur-literatur sebelumnya melihat bahwa peran modal sosial penting dalam menghasilkan sebuah keberhasilan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat (Gittel & J, 2001). Dalam kasus ini dijelaskan bahwa adanya kerja sama antara kelompok-kelompok masyarakat dengan lembaga-lembaga negara. Dalam suatu kebijakan, negara tidak berdiri sendiri, perlunya peran masyarakat

sebagai sebuah entitas yang terdampak langsung dari suatu kebijakan tersebut, maka dari itu, modal sosial yang kuat menjadi perhatian yang sangat penting dalam kajian ini, sehingga dalam merumuskan kebijakan tidak bersifat kaku atau hierarkis seperti yang dialami di Kabupaten Banyuwangi.

Modal sosial memberikan suatu gambaran bagaimana kelompok masyarakat saling berinteraksi dan membangun jaringan sosial secara kolektif. Modal sosial menurut Bain dan Hicks (Syahra, 2003), terdapat dua dimensi yang dijadikan alat analisis dalam melihat modal sosial masyarakat. Dimensi yang pertama adalah dimensi kognitif atau yang sering disebut dengan dimensi kultural adalah sekumpulan suatu nilai, norma, ajaran, budaya, yang memiliki dampak langsung terhadap solidaritas dan kepercayaan suatu kelompok. Nilai-nilai yang sama, yang saling melengkapi membuat kepercayaan tumbuh, seperti yang dikatakan oleh Fukuyama, kemudian menjadikan kepercayaan dan solidaritas menuju tujuan bersama. Dalam dimensi kultural, tidak menekankan pada aspek segmentasi kelompok, namun dimensi ini bersifat lintas-kelompok. Artinya, perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, yang terpenting adalah terciptanya suatu tatanan sosial yang itu memberikan dampak kesejahteraan untuk masyarakat. Dimensi selanjutnya yaitu dimensi struktural, berupa kelompok masyarakat yang terorganisir secara kelembagaan yang berada di tingkat lokal. Kelompok ini mewadahi aspirasi masyarakat dan mendorong terselenggarakannya kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat. Secara umum, dimensi ini menitikberatkan pada aktivitas sosial yang dilakukan oleh lembaga yang kemudian dimaknai sebagai sebuah jaringan sosial yang terjalin di dalamnya. Kelompok ini bisa berupa Karang Taruna, LSM, organisasi filantropi, maupun lainnya yang keberadaannya berada di tingkat lokal.

- **Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik**

Modal sosial yang kuat akan menghasilkan partisipasi masyarakat yang aktif, hal ini juga memiliki kaitannya dengan proses pembuatan kebijakan. Secara teknis diperlukannya partisipasi masyarakat yang bersifat emansipatoris. Dominasi pengetahuan yang dibentuk dalam setiap kebijakan menyebabkan kebijakan dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip ataupun kearifan lokal yang sudah tertanam kuat di masyarakat. Untuk menciptakan suatu kebijakan publik, dibutuhkan tiga

entitas kelompok dalam perumusan kebijakan publik; eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Dalam skup yang lebih kecil, pemerintah desa sebagai aktor eksekutif, Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif, dan kelompok-kelompok sosial sebagai bagian dari elemen masyarakat.

Dalam literatur yang lebih sederhana menjelaskan bahwa konsep partisipasi dijadikan sebagai sebuah jembatan politik antara pemegang kekuasaan, kebijakan, dan masyarakat yang secara konstitusi memiliki hak kewarganegaraan baik secara sosial, ekonomi dan politik (Prayitno, 2008). Menurut Cohen dan Uphoff (1988), partisipasi masyarakat sebagai penerima program kebijakan terdiri dari empat tahap partisipasi; (1) perencanaan; (2) implementasi; (3) pemanfaatan; (4) evaluasi program pembangunan. Dalam hal ini kebijakan harus dilihat sebagai suatu produk hukum yang harus dimiliki oleh masyarakat setempat. Kelompok sosial harus melibatkan diri secara aktif dalam hal perumusan kebijakan, karena kebijakan tersebut akan berdampak langsung terhadapnya. Cohen dan Uphoff mendefinisikan partisipasi dalam kebijakan publik ditujukan pada penerima program kebijakan yakni masyarakat, definisi ini juga memiliki permasalahan dalam pandangan penulis. Dalam pandangan ini disebutkan bahwa masyarakat merupakan penerima kebijakan pemerintah, cara pandang yang dibangun bersifat negara, seyogyanya kebijakan publik harus dimaknai berasal dari masyarakat kemudian kembali kepada masyarakat itu sendiri. Negara hanya sebagai pengelola anggaran dalam mengatur kebijakan secara formalitas, namun secara substansi dari kebijakan tersebut harus didasarkan pada keinginan masyarakat setempat.

Dalam pandangan seperti ini partisipasi masyarakat di Banyuwangi perlu ditingkatkan secara lebih mendalam. Kebijakan Smart Kampung yang berbasis pada pendekatan teknologi secara konsepsional, sangat membantu masyarakat dalam hal urusan pelayanan administratif. Namun pelaksanaannya menuai banyak persoalan, dimana banyak masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang masih belum mengerti dalam penggunaan teknologi melalui kebijakan Smart Kampung. Kebijakan tersebut secara lebih sederhana dipaksa untuk menuruti kehendak negara, lebih tepatnya dalam hal penyederhanaan administratif. Kebijakan tersebut salah satu upaya pemerintah dalam menerapkan inovasi kebijakan berbasis pada teknologi,

namun justru tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni, masyarakat cenderung sulit untuk mengimbangi kebijakan tersebut melalui pendekatan teknologi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus lebih aktif dalam hal merumuskan kebijakan, kemudian pelaksana dan pengawasan atas penggunaan anggaran serta implementasinya harus dikelola secara langsung oleh kelompok-kelompok sosial yang ada, sehingga memunculkan kebijakan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Fokus artikel ini didasarkan pada evaluasi kebijakan Smart Village yang telah banyak diterapkan di berbagai daerah. Maka dari itu, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan datanya paling banyak digunakan dari berbagai literatur seperti jurnal, artikel serta berita media. Karena objek kajiannya berupa evaluasi kebijakan, maka penelitian ini menambahkan beberapa data wawancara yang difokuskan pada domain masyarakat sebagai penerima kebijakan selama ini serta aparatur negara yakni kepala desa sebagai pelaksana kebijakan tersebut, guna menunjang relevansi dalam menjawab permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama-tama, penulis mengambil beberapa data berupa literatur, hasil riset, serta berita media massa yang membahas bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan, serta menganalisis apa yang menjadi persoalan pada kebijakan tersebut. Kemudian penulis mengadopsi beberapa konsep yang menitikberatkan pada persoalan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat melaksanakan tujuan dari kebijakan tersebut dengan semestinya.

Langkah selanjutnya dengan cara mengambil data berupa wawancara untuk menguatkan argumen penelitian ini, sehingga pokok persoalannya dapat diidentifikasi secara jelas. Kemudian menganalisisnya dengan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga memunculkan sebuah tawaran atas evaluasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat yang dianggap selama ini hanya sebagai penerima kebijakan, dapat merasakan akses secara langsung demi mewujudkan kesejahteraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *Smart Kampung* Kabupaten Banyuwangi berangkat dari gagasan pemerintah daerah guna menciptakan pelayanan yang mudah dan cepat dengan menggunakan pendekatan teknologi informasi. Program yang memiliki nama *Kampung* dilihat sebagai identitas Banyuwangi dalam memberikan terobosan baru dalam hal pemberian layanan publik berbasis desa/kelurahan. Secara legal formal, kebijakan ini memiliki kesepakatan antara Pemda Banyuwangi dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, yang tertuang pada penandatanganan MoU dengan nomor: TEL.198/HK.810/BGES.1304000./2016. Pelaksanaanya meliputi pemasangan alat teknologi seperti *wifi* di setiap pemerintahan desa di Kabupaten Banyuwangi. Program ini memiliki tujuh kriteria sebagai indikator keberhasilan utama dalam kebijakan tersebut (Lihat Tabel 1).

Tabel 1.
Kriteria Program Smart Kampung Kabupaten Banyuwangi

| No | Program Smart Kampung | Fokus |
|----|-----------------------|---|
| 1 | Pelayanan Publik | Penggunaan Teknologi untuk memberikan pelayanan berbasis <i>online</i> . Program ini menggunakan berbagai aplikasi, diantaranya; aplikasi surat menyurat; akta <i>online</i> ; dan SPM. |
| 2 | Pemberdayaan Ekonomi | Penggunaan Teknologi dijadikan sebagai alat bantu bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha kecilnya. Produk ataupun jasa yang dihasilkan akan di <i>upload</i> melalui website <i>banyuwangimall.com</i> |
| 3 | Kesehatan | Memberikan keringanan untuk masyarakat kurang mampu melalui Surat Pernyataan Miskin (SPM). |
| 4 | Kemiskinan | Mendapatkan akses <i>internet</i> secara gratis di setiap kantor desa/kelurahan, yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan informasi masyarakat. |
| 5 | Informasi Hukum | Penyediaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis <i>online</i> untuk mengajak masyarakat agar mengetahui prosedur-prosedur hukum yang berlaku. |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 6 | Pendidikan, Seni dan Budaya | Mendapatkan akses gedung balai desa untuk digunakan sebagai tempat latihan atau festival kebudayaan di Banyuwangi. |
| 7 | Peningkatan Kapasitas SDM | Pelatihan masyarakat membuat kerajinan sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya. |

Sumber: Berbagai sumber, diolah penulis, 2019.

Sejak awal penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dalam persoalan kebijakan publik. Dinilai bahwa kebijakan berbasis pada teknologi tersebut belum menjangkau semua persoalan masyarakat. Berlandaskan pada kajian pustaka serta didukung oleh beberapa hasil wawancara, penulis menemukan persoalan yang dialami oleh kebijakan *Smart Kampung*. Pertama, partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan kebijakan terbilang cukup rendah serta kebijakan tersebut sulit dioptimalkan khususnya di daerah pinggiran; kedua, persoalan sumber daya masyarakat yang kurang mumpuni dalam beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

- **Partisipasi Perencanaan Kebijakan**

Pada tahap perencanaan kebijakan, hasil beberapa literasi yang menunjang penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Banyuwangi terhadap perencanaan kebijakan *Smart Kampung* terbilang cukup rendah. Tujuan diberlakukannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan persoalan kemiskinan, serta sumber daya manusia yang cukup rendah. Namun dalam hal perencanaan, masyarakat tidak terlibat cukup aktif dalam merumuskan kebijakan tersebut. Temuan menarik di Desa Tamansari, masuk dalam kategori rendah dimana terdapat 58 persen masyarakat yang kurang berpartisipasi aktif dalam hal perencanaan kebijakan *Smart Kampung* (Komunikasi, Pengembangan, & Manusia, 2017). Hal ini berkaitan dengan proses penyampaian aspirasi masyarakat terhadap aparat desa atau negara. Masyarakat kurang mengetahui apa saja yang akan direncanakan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan. Masyarakat justru tidak mengetahui apa-apa tentang persiapan awal yang akan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat merasa tidak

diundang dalam bentuk forum mediasi, yang seharusnya juga melibatkan masyarakat itu sendiri. Data tersebut juga menunjukkan bahwa dalam tahap ini, pemerintah hanya mengundang petinggi-petinggi desa untuk dimintai pendapat, sedangkan masyarakat biasa tidak pernah mengetahui akan adanya program tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan pemahaman warga dalam melihat kebijakan tersebut, di Desa Kedungrejo misalnya, yang masih menggunakan cara-cara manual dalam mengurus persoalan administratif kependudukan, seharusnya kebijakan tersebut memudahkan persoalan administratif melalui basis teknologi. Artinya, partisipasi masyarakat dapat dikatakan belum maksimal dalam memahami makna dari terbentuknya kebijakan *Smart Kampung*.

- **Pelaksanaan Kebijakan**

Dalam pelaksanaan kebijakan difokuskan pada bagaimana kebijakan tersebut berjalan, sarana pra-sarana, partisipasi masyarakat, serta kondisi objektif daerah tersebut guna menyokong kebijakan *Smart Kampung*. Secara teknis, kebijakan tersebut berjalan dengan menggandeng pemerintah desa sebagai aparatur negara yang sangat dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, seperti urusan administratif, kemiskinan, serta persoalan publik lainnya. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa desa yang memenuhi kriteria dari kebijakan *Smart Kampung*. Hal ini justru mendapat pengakuan dari Kabid Statistik Diskominfo Banyuwangi, bahwa saat diterapkannya kebijakan tersebut, terdapat kantor-kantor desa yang belum memenuhi syarat. Alasannya, karena terkendala beberapa fasilitas yang belum memenuhi kriteria *Smart Kampung*, salah satunya fasilitas *wifi*, banyak kantor-kantor desa yang belum memiliki fasilitas tersebut. Informasi lainnya mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut mendapati bahwa masyarakat tidak benar-benar mengerti substansi dari kebijakan *Smart Kampung*. Masyarakat hanya menganggap hadirnya *Smart Kampung* terletak pada perbedaan komponen luarnya saja dari yang awal bersifat tradisional kemudian berganti modern melalui teknologi. Masyarakat daerah Muncar misalnya, menganggap bahwa fasilitas *internet* yang disediakan oleh kantor desa hanya digunakan sebagai tempat kumpul bermain *game online* (Pamungkas, 2019a). Hal ini

sebagai indikator bahwa pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan *Smart Kampung* sebatas pada aspek teknologi saja. Hal ini bertentangan dengan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut, yang melihat bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk memberantas persoalan kemiskinan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dari beberapa persoalan yang ada, kebijakan tersebut sangat sulit diterapkan di daerah pinggiran Banyuwangi. Beberapa temuan penelitian lainnya mengatakan bahwa kebijakan tersebut banyak menuai kendala khususnya persoalan teknis. Seperti kendala *internet* yang kurang menjangkau di daerah-daerah pelosok (Ahmad, 2018), dibutuhkannya sebuah alat teknologi yang dapat menjangkau jaringan *internet* agar dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.

Apabila merujuk pada basis yang bersifat teoritis, konsep *Smart Kampung* yang ada di Banyuwangi tidak berjalan sesuai dengan konsep *Smart Village* yang telah ada. Memang pada dasarnya, konsep ini menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk memudahkan pemerintah dalam mengakomodir kepentingan masyarakat. Akan tetapi, konsep tersebut tidak menitikberatkan pada nilai-nilai lokalitas masyarakat yang telah lama terbentuk. Sebagaimana konsep yang ditawarkan oleh *European Network for Rural Development (ENRD)* bahwa *Smart Village* diawali dengan inisiatif warga setempat yang berkumpul bersama dalam memecahkan persoalan secara kolektif serta mengimplementasikan tujuan bersama tersebut menjadi sebuah aksi nyata (ENRD, 2019). Oleh karena itu, diperlukannya partisipasi secara aktif bagaimana kebijakan tersebut terbentuk bukan memaksakan kehendak pemerintah dalam sebuah perumusan kebijakan. Selain itu, konsep *Smart Village* juga bersifat *bottom-up* dengan melibatkan secara penuh kepentingan masyarakat dan menjadikannya sebagai relasi kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat. Hal tersebut ditemui dalam kebijakan *Smart Kampung* Banyuwangi yang sedari awal tidak menitikberatkan pada aspek partisipasi masyarakat lokal, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti substansi dari kebijakan tersebut, sehingga yang terjadi adalah kebijakan tersebut tidak berasal dari paradigma *society*, namun dibentuk dengan menggunakan paradigma negara, yang justru sulit mendapatkan relevansinya dengan kepentingan masyarakat.

Perlunya Keterlibatan Kelompok Sosial

Seperti yang dijelaskan diatas, upaya pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan yang difasilitasi oleh Pemdes melalui pengadaan fasilitas desa berupa akses penggunaan balai desa dalam setiap kegiatan warga, serta penggunaan *wifi* secara gratis di kantor desa. Menurut pemerintah, hal ini menciptakan suasana desa yang humanis, desa tidak hanya tempat pelayanan publik semata, namun desa juga sebagai sentral kegiatan warga dalam dalam seluruh aspek kehidupannya.

Baik secara konsep maupun implementasi, program *Smart Kampung* bersifat sangat luas. Artinya program tersebut menggunakan pendekatan teknologi untuk menunjang pelayanan publik, dan tujuan dari adanya program tersebut adalah untuk menanggulangi angka kemiskinan di Banyuwangi. Karena sifat programnya yang sangat luas, hal ini menjadi permasalahan tersendiri terhadap jalannya suatu kebijakan. Luasnya cakupan program *Smart Kampung* ini terletak di berbagai dimensi persoalan, misalnya dari urusan pelayanan publik hingga ke persoalan kemiskinan. Dalam suatu kebijakan, seharusnya diperlukan memfokuskan ke salah satu persoalan, tidak menjangring persoalan yang masih bukan menjadi persoalan prioritas di Banyuwangi. Hal ini berkaitan dengan efektivitas dalam melaksanakan suatu program kebijakan, apabila kebijakan terlalu luas, maka persoalan yang bersifat partikular akan cenderung diabaikan oleh pemerintah. Karena luasnya fokus dari kebijakan ini, masyarakat masih banyak yang tidak tahu akan keberadaan jalannya program tersebut.

Sebagai inovasi pelayanan publik, tampaknya kebijakan *Smart Kampung* sepertinya telah menjawab masalah tersebut. Melalui akses berupa digital, pelayanan yang cepat, meningkatkan usaha masyarakat melalui teknologi menyebabkan tingkat kemiskinan secara bertahap mulai mengalami penurunan. Namun klaim atas keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, tampaknya pemerintah cenderung gagal mengidentifikasi sumber daya manusia di level masyarakat. Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia masyarakat adalah dengan melakukan pemetaan terhadap SDM di setiap kelompok masyarakat, masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan

cenderung tidak dapat diseragamkan. Secara karakteristik sosial-budaya, Banyuwangi memiliki tiga etnis yang berbeda. Untuk daerah perkotaan dihuni mayoritas Suku Osing dan Jawa, Banyuwangi selatan; Suku Jawa, sedangkan daerah utara banyak dihuni oleh Suku Madura dan Jawa. Dari etnis yang berbeda ini, pemerintah perlu mengidentifikasi karakteristik sosial serta persoalan yang dialami setiap daerah di Banyuwangi. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pemetaan terhadap tingkat sumber daya manusia, karena kebijakan harus dirasakan oleh semua elemen, sudut pandang pembuat kebijakan bukan sepenuhnya menjadi jawaban atas persoalan yang dialami masyarakat.

Apabila persoalan sumber daya manusia telah terpenuhi, dan masyarakat cenderung berpartisipasi aktif dalam suatu kebijakan, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengurangi kekuatan kebijakan secara administratif. Kebijakan yang hari ini hadir terlalu mendominasi cara pandang masyarakat dalam mengidentifikasi persoalannya. Melalui kebijakan *Smart Kampung*, pemerintah kemudian melakukan pendampingan secara berkala terhadap masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan, diajak untuk berdiskusi, sehingga muncul karakteristik sosial masyarakat yang bersifat terbuka. Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik, maka tawaran selanjutnya adalah menyerahkan agenda pengelolaan atas kebijakan terhadap kelompok sosial yang ada. Kelompok sosial disini harus mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat, hal yang paling sederhana dengan melibatkan kelompok pemuda, kelompok sosial lainnya –misalnya, Karang Taruna- yang kemudian membuat sebuah organisasi baik secara struktural maupun kultural.

Dalam sebuah hasil riset penelitian yang dilakukan oleh SMERU Research Institute dengan judul *Keluar dari Kemiskinan: Pengalaman Individu dan Komunitas*, menjelaskan bahwa terdapat masyarakat yang secara kolektif dapat keluar dari angka kemiskinan. Menurutnyanya angka kemiskinan diakibatkan oleh keterlibatan kelompok-kelompok sosial yang telah lama terbentuk. Mereka berpartisipasi secara kolektif, merumuskan persoalannya sendiri, kemudian membuat sebuah terobosan berupa pelatihan-pelatihan berbasis pada kolektivitas (SMERU, 2007). Penelitian yang dilakukan di beberapa daerah salah satunya NTT dan Jawa Timur menunjukkan bahwa modal sosial mempunyai peran penting dalam menentukan arah mobilitas

kesejahteraan masyarakat. Setiap individu mendapatkan manfaat dari hubungan dengan organisasi maupun individu lainnya yang bisa memberikan fasilitas, informasi, dan membuka peluang pekerjaan (Lihat Mawardi dalam SMERU, 2007). Aspek-aspek seperti jejaring, kebersamaan, pertemanan, solidaritas, kekerabatan, dan saling *trust* dapat membuka akses kepada berbagai sumber daya dan memafasilitasi secara kolektif.

Melihat keterlibatan kelompok sosial yang telah dijelaskan di atas, maka kebijakan *Smart Kampung* Banyuwangi menjadi sangat bermakna apabila melibatkan kelompok sosial yang telah ada. Perlunya aktivasi secara aktif pada kelompok-kelompok sosial dengan cara melakukan koordinasi antara kelompok sosial dengan pemerintah daerah maupun desa terkait pemberdayaan masyarakat. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah sebagai aktor yang sangat dominan perlu dikurangi fungsinya. Pemerintah seharusnya hanya sebagai fasilitator dari sebuah kebijakan, pemerintah menyerahkan agenda politiknya kepada kelompok sosial. Dalam perumusan kebijakan, misalnya, banyak kasus bahwa pemerintah cenderung melakukan koordinasi dengan kelompok sosial melalui musyawarah (misalnya Musrenbang) hanya sebatas formalitas belaka. Namun dengan menitik-beratkan perumusan kebijakan sepenuhnya kepada *society* dengan menyerahkan agenda politik pemerintah, maka persoalan kemiskinan tidak hanya didefenisikan oleh negara melalui data kemiskinan berupa angka BPS, namun persoalan kemiskinan mendapatkan makna alternatif yang berasal dari arus bawah melalui kelompok sosial. Karena pada dasarnya, kelompok sosial tersebut secara emosional yang sangat dekat dengan masyarakat setempat.

Hal ini merupakan konsepsi pemerintahan baru yang memungkinkan elemen masyarakat untuk melakukan sendiri atau mengerjakan sendiri dalam bidang-bidang pelayanan yang dapat dikerjakan langsung oleh publik, konsepsi semacam ini dikenal sebagai *citizen empowerment* yang diharapkan akan mampu meningkatkan akuntabilitas pejabat publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat *civil society* (Setiyono, 2016). Pemerintah kemudian hanya memanfaatkan kelompok yang sudah terbentuk, memberikan akses politik, menyerahkan pengelolaan atas kebijakan menurut kebutuhan masing-masing

daerah. Ini merupakan komponen lanjutan apabila ingin menghadirkan partisipasi masyarakat yang aktif, dimulai dari mengurangi dominasi negara dalam pengelolaan atas suatu kebijakan.

Menciptakan Kebijakan Berbasis Kolektivitas

Di bagian akhir, penulis lebih memberikan sebuah penawaran terkait skema kebijakan yang berbasiskan pada komunitas atau solidaritas. Karena kebijakan yang berbasis pada negara cenderung tidak dapat menjawab persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Penyediaan kesejahteraan hampir cenderung tidak mendapatkan tempat di level masyarakat, menurut pernyataan Stokke (2013), masyarakat yang tidak ternaungi akses kesejahteraan oleh negara akan mencoba mencari ruang-ruang baru untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa kelompok sosial, keagamaan, etnis maupun budaya. Program *Smart Kampung* bagus sebagai inovasi pelayanan publik, namun dalam menjawab persoalan kebutuhan masyarakat cenderung tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Meskipun data BPS menunjukkan angka kemiskinan turun, namun dalam faktanya, banyak masyarakat yang masih tidak merasakan akan hadirnya program tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Mantan Kepala Desa Kedungrejo, Bapak Abdurrahman yang mengatakan bahwa;

“...kalau lihat banyuwangi itu hanya menang di endorse keluar kota saja. Coba sampean lihat dalem-dalemnya, ya ga sesuai sama yang ada di media-media. Program ini cuma bagus di desa yang dekat kota, tapi kalau desa pinggir kayak daerah pesisir dan pegunungan masih banyak kendala dengan program ini. Contohnya aja dalam pembuatan surat akta masih menggunakan manual orang-orang ini, ga optimal, dan juga alatnya masih belum ada dari kabupaten..” (Pamungkas, 2019c)

Penjelasan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah tidak benar-benar serius dalam melaksanakan kebijakannya. Masih terdapat desa-desa yang belum dijangkau oleh alat teknologi. Di Desa Kedungrejo masih terkendala dengan persoalan pelayanan publik berbasis teknologi, terdapat sejumlah pelayanan yang masih menggunakan cara-cara manual. Desa tersebut terletak di Kecamatan Muncar, lokasinya berada di daerah pinggir atau lebih tepatnya daerah pesisir. Dari segi

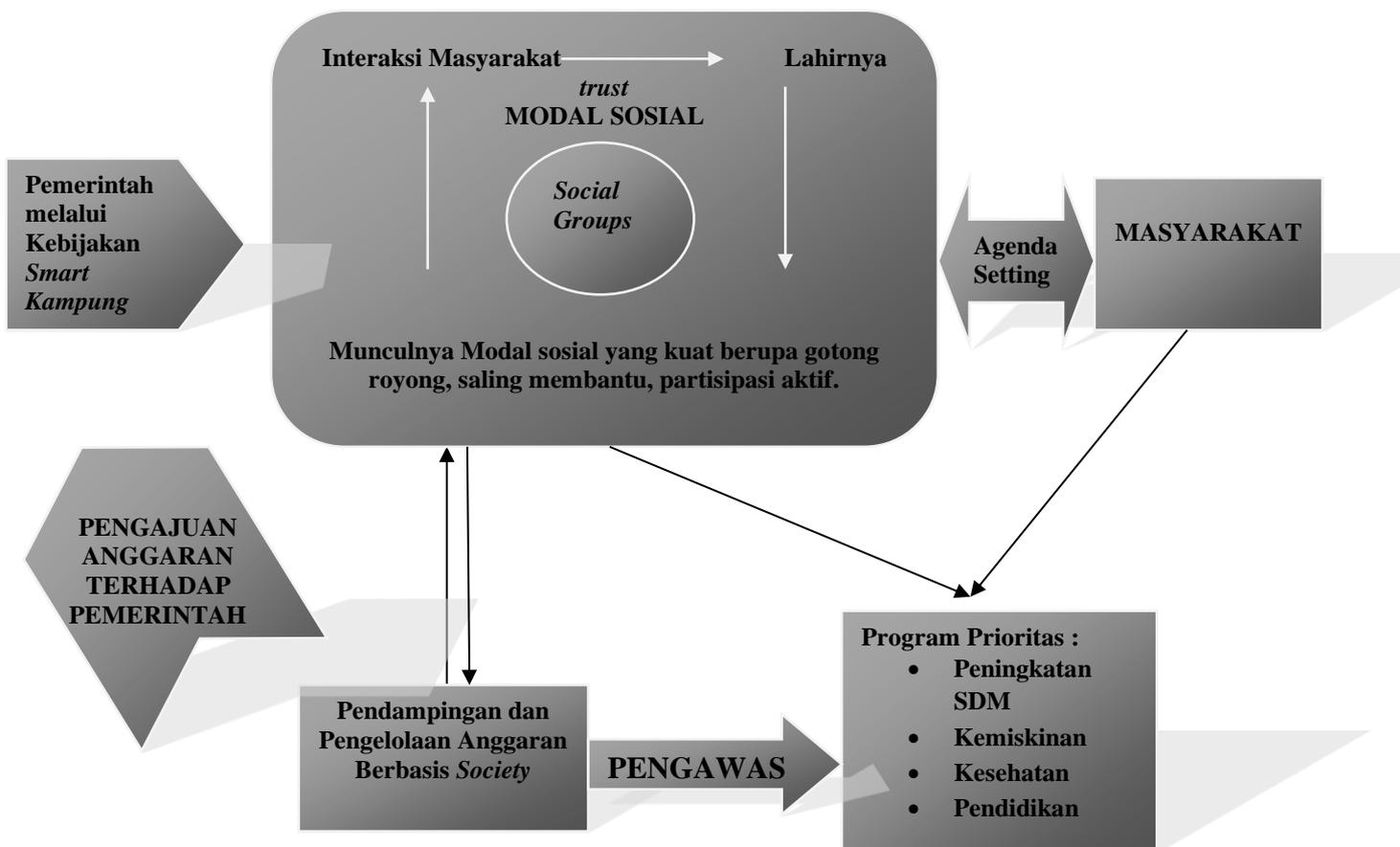
pengadaan barang juga belum terdistribusi secara merata dari pihak Pemda Banyuwangi ke pemerintah desa, kendalanya bukan terletak pada kapasitas sumber daya manusianya saja, namun pengadaan barang juga tidak terlaksana dengan baik oleh pemerintah daerah. Salah satu pemuda Kedungrejo juga mengatakan hal yang serupa dengan jalannya program ini dengan mengatakan bahwa;

“...Smart Kampung ini cuma berjalan di kantor desa, internet ya juga ada disana, mana pernah tempat umum ada internetnya, ya cuma di kantor desa, jadi ga mengena ke masyarakat. Sebenarnya ya mas, prgoram ini banyak juga masalahnya, program ini kan berjalan agar masyarakat melek internet, tapi sebelum ada program ini, masayrakat sudah melek internet mas. Wong banyak yang pake android, terus apa tawaran pemerintah buat warga sini kalau sudah sama-sama melek teknologi. Masalah wifi ya itu juga, memang ada barangnya, tapi lemot terus mau dipake buat apa coba kalau lemot...”

(Pamungkas, 2019b)

Alih-alih sebagai program yang menjawab kemiskinan masyarakat Banyuwangi, justru program ini dalam implementasinya masih terkendala terkait urusan-urusan teknis. Kegelisahan yang dialami oleh masyarakat cenderung tidak mendapatkan tempat oleh pemerintah. Pemda Banyuwangi kerap kali menggunakan slogan-slogan menarik berupa “Banyuwangi Pintar”, “Banyuwangi Digital”, “Sunrise of Java” hanya untuk dijadikan sebagai komoditas politik, dengan mengendorse slogan tersebut melalui media sosial, yang dampaknya berupa naiknya tingkat popularitas daerah Banyuwangi sekaligus aktor politik dalam pembuat kebijakan. Sebagaimana argumen Wahab (2008) yang menyatakan bahwa kebijakan harus mencakup perilaku, harapan-harapan publik, dan dalam pelaksanaannya harus memenuhi prosedur yang berlaku, serta pemerintah harus dapat memenuhi target atau *goal* dari kebijakan yang mereka rumuskan. Dalam konteks *Smart Kampung*, kebijakan secara prosedur masih terkendala, dan perilaku dari pembuat ataupun pelaksana kebijakan pun masih tidak berjalan dengan baik. Secara politik, kebijakan ini masih belum memenuhi janji atau harapan yang diinginkan masyarakat, yang ada hanyalah memudahkan para aparatur pemerintah dalam penyederhanaan administrasi bukan pada substansi dari kebijakan tersebut dalam menanggulangi persoalan masyarakat.

Bagan 1.
Alur Kebijakan Berbasis Society



Sumber : Dioalah dari berbagai sumber, 2019.

Penulis menawarkan alur kebijakan (lihat bagan. 1) sebagai jawaban dari persoalan yang telah dijelaskan. Banyaknya masyarakat yang masih belum tercover dengan hadirnya *Smart Kampung*. Kebijakan berbasis *society* ini dapat berjalan jika ada *trust* sehingga munculnya modal sosial yang kuat di ranah masyarakat. Skema dari kebijakan ini terletak pada penyerahan agenda politik dari pemerintah menuju masyarakat, pemerintah memberikan sepenuhnya agenda politiknya terhadap kelompok-kelompok sosial yang telah terbentuk sejak lama. Penyerahan agenda politik berupa penyerahan anggaran daerah Kabupaten Banyuwangi, anggaran dikelola secara mandiri oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Kemudian representasi masyarakat yakni kelompok sosial yang telah terbentuk akan merumuskan bersama-sama dengan masyarakat setempat, sehingga terbentuknya formulasi kebijakan. Dalam hal merumuskan, masyarakat wajib merumuskan

permasalahan yang dianggap paling fundamental, contohnya persoalan SDM, kemiskinan, kesehatan maupun akses terhadap pendidikan. Dalam perumusan kebijakan, masyarakat tidak berdiri secara mandiri, namun perlu diawasi melalui bentuk-bentuk pendampingan dalam merumuskan permasalahan yang akan diprioritaskan, sehingga ada *check and balances* di antara lingkungan tersebut. Pengawasan dan pendampingan ini lahir dari kelompok masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menciptakan nuansa baru dalam perumusan kebijakan yakni berbasis pada kolektivitas dan solidaritas. Dari sini dapat dilihat bahwa *society groups* tidak dilihat sebagai sebuah fenomena yang konotasinya bersifat negatif, dalam artian kelompok masyarakat tidak hanya dipandang sebagai kelompok “separatis”, pragmatis, kolot, bahkan mendapatkan label kurang berpengetahuan. Namun kelompok sosial hadir dengan merumuskan secara langsung kebijakan sehingga mampu menjawab persoalan mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Dari adanya pendampingan dan pengawasan, dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam menentukan kualitas hidupnya secara layak. Skema yang terakhir adalah pengajuan anggaran terhadap pemerintah, pengajuan ini sesuai dengan substansi dari perumusan kebijakan yang telah dibahas sedemikian rupa. Dari tawaran tersebut, kerja-kerja negara dapat terbantuan secara maksimal.

Kasus yang tepat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan berbasis *society* adalah Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Kota Kediri. Pemkot Kota Kediri memberikan dana hibah pemerintah daerah untuk didistribusikan ke seluruh Rukun Tetangga (RT), jumlah RT di Kota Kediri sebanyak 1442 RT yang tersebar ke dalam tiga kecamatan. Dana yang dikucurkan pemerintah senilai 50 Juta per RT per tahun, artinya sekitar sebanyak 72 Miliar dana yang perlu dikeluarkan oleh negara (“Dana Prodamas Kota Kediri Sudah Cair, Per RT Dapat Rp50 Juta,” 2018). Dari program ini, masyarakat mengetahui persoalan daerahnya sendiri serta dapat mengatur hal tersebut melalui perumusan kebijakan yang berbasis *society*. Pemkot Kediri hanya menyediakan fasilitas berupa anggaran dan melakukan audit secara ketat terhadap pengelolaan anggaran tersebut. Kebijakan tersebut berjalan cukup baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila melihat kondisi pemerintahan Banyuwangi, tampaknya dapat menerapkan kebijakan berbasis

society. Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Banyuwangi dalam setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan karena pariwisata Banyuwangi dijadikan sebagai destinasi utama masyarakat luar kota hanya untuk berlibur, jika dibandingkan dengan kabupaten terdekatnya seperti Situbondo, Bondowoso dan Jember (“Ekonomi Banyuwangi Melesat Gara-gara Pariwisata,” 2018). Dengan pendapatan yang terbilang besar, seyogyanya Banyuwangi dapat meminjam atau mengadopsi program terobosan yang diangkat Kota Kediri melalui kebijakan *Smart Kampung* yang masih banyak terkendala masalah.

KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya menerapkan kebijakan dengan menggunakan pendekatan berbasis teknologi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tertuang dalam kebijakan *Smart Kampung* sebagai sebuah inovasi kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan yang terus-menerus menghantui daerah Banyuwangi. Disamping itu, pemerintah juga berupaya melakukan efektivitas terhadap pelayanan publik, menganggap bahwa masih banyak masyarakat yang masih berbelit-belit dalam urusan administrasi pelayanan publik. Penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah cenderung bersifat satu-arah, artinya pemerintah sebagai entitas tunggal dalam menafsirkan persoalan yang terjadi di level masyarakat. Perlunya penyerahan agenda politik dari pemerintah terhadap masyarakat, agar terciptanya masyarakat yang dapat mandiri baik secara ekonomi, sosial-politik maupun budaya.

Dalam beberapa literatur penelitian mengatakan bahwa Kebijakan *Smart Kampung* dinilai cukup baik dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun masih banyak celah permasalahan yang masih belum terlihat oleh beberapa peneliti terkait persoalan distribusi akses dan kesejahteraan yang masih menyimpan persoalan serius. Gap tersebut yang kemudian diangkat oleh penulis, yang tidak hanya menekankan pada aspek evaluasi kebijakan, namun menawarkan alternatif kebijakan sebagai jawaban atas kegelisahan yang dirasakan masyarakat. Kebijakan berbasis *society* harus menyertakan kelompok sosial yang memiliki modal sosial

secara kuat. Modal sosial terbentuk melalui interaksi, semangat kolektivitas, sehingga memunculkannya *trust* di level masyarakat. Modal sosial yang terbentuk akan menciptakan partisipasi yang aktif, sehingga masyarakat tidak terus-menerus dijadikan objek kebijakan, namun sebaliknya, sebagai subjek sekaligus objek dari kebijakan tersebut.

Beberapa data yang telah didapatkan oleh penulis, menjelaskan bahwa kebijakan *Smart Kampung* secara konsep, terbilang cukup baik dalam hal kemudahan pelayanan. Namun pelaksanaannya justru terkendala secara teknis. Secara prosedural, pengadaan barang kebijakan tersebut tidak terdistribusi secara merata dalam setiap desa, banyaknya desa-desa pinggir yang tidak terakomodir dari kebijakan tersebut. Senada dengan persoalan tersebut, pelaksanaannya juga tidak dapat memenuhi *goal* dari kebijakan *Smart Kampung* tersebut dalam hal kemiskinan. Meskipun data BPS menunjukkan penurunan kemiskinan, kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan dampak positif secara ekonomi yang dihadirkan melalui kebijakan *Smart Kampung*.

Penjelasan yang telah dibahas menjabarkan kebijakan *Smart Kampung* beserta implementasinya sehingga memunculkan alternatif kebijakan yang berbasis pada kelompok-kelompok sosial. Tawaran ini berupaya menguatkan modal sosial serta menunjang masyarakat dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Kelompok ini perlu mendapatkan kepercayaan oleh negara, negara cenderung terlalu dominan dalam mengidentifikasi tentang kelompok tersebut, seolah-olah semua kelompok memiliki karakteristik yang serupa. Ketika dalam pelaksanaannya, alternatif kebijakan berbasis *society* ini mencoba menambal kebijakan *Smart Kampung* dengan melihat permasalahan yang masih banyak dirasakan oleh masyarakat, bukan merombak-ulang kebijakan tersebut secara fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, P. (2017). Kemenkominfo Pilih “Smart Kampung” Banyuwangi jadi Smart City. Retrieved November 29, 2019, from <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3508970/kemenkominfo-pilih-smart-kampung-banyuwangi-jadi-smart-city>
- Dana Prodama Kota Kediri Sudah Cair, Per RT Dapat Rp50 Juta. (2018). Retrieved from <https://www.solopos.com/dana-prodama-kota-kediri-sudah-cair-per-rt->

[dapat-rp50-juta-905039](#)

- Ekonomi Banyuwangi Melesat Gara-gara Pariwisata. (2018). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181024185148-269-341178/ekonomi-banyuwangi-melesat-gara-gara-pariwisata>
- ENRD. (2019). *How to support Smart Villages strategies which effectively empower rural communities? Orientations for policy-makers and implementers.* (2), 1–12. Retrieved from https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-how-support-smart-villages-strategies-which-effectively-empower-rural_en
- Fukuyama, F. (2002). *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran.* Yogyakarta: Qalam.
- Gittel, R., & J, P. T. (2001). Social Capital and Poor Communities. In S. Saegert, J. P. Thompson, & M. R. Warren (Eds.), *Making Social Capital Work: Social Capital and Community Economic Development* (pp. 115–135). New York: Russell Sage Foundation.
- Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? *City*, 12(3), 303–320. <https://doi.org/10.1080/13604810802479126>
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis.* Yogyakarta: Gava Media.
- Komunikasi, S., Pengembangan, D. a N., & Manusia, F. E. (2017). *Modal Sosial Dan Partisipasi Masyarakat.* 2(4), 1–18.
- Pamungkas, N. L. (2019a). *Ali Topan (Pemuda Muncar) (Interview).* Banyuwangi.
- Pamungkas, N. L. (2019b). *Kelompok Pemuda Literasi Muncar, (Interview).* Banyuwangi.
- Pamungkas, N. L. (2019c). *Kepala Desa Kedungrejo, Muncar, Periode 2013-2018 (Interview).* Banyuwangi.
- Pemerintah Banyuwangi. (2017). BPS: Angka Kemiskinan Banyuwangi Turun Menjadi 8,79 Persen. Retrieved from <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/bps-angka-kemiskinan-banyuwangi-turun-menjadi-879-persen.html>
November 29, 2019
- Prayitno, D. (2008). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN*

PEMERINTAH. Universitas Dipenogoro.

- Putnam, R. (1993). "The prosperous community: Social capital and public life." *The American Prospect*, 4(13), 35–42.
- Setiyono, B. (2016). *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Admiistrasi* (Edisi Keti). Bandung: Nuansa Cendikia.
- SMERU. (2007). Moving Out of Poverty: Individual and Community Experiences. *SMERU Research Intitute*, (24), 1–34.
- Sodiqin, A. (2018). Kalangan Akademisi Kritisi Pemerintahan Bupati Anas. Retrieved, from <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2018/01/03/37470/kalangan-akademisi-kritisi-pemerintahan-bupati-anas>, November 30, 2019
- Syakra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1), 1–22. Retrieved from <http://www.jurnalmasyarakatdanbudaya.com/index.php/jmb/article/view/256>
- Uphoff, N. T., & Esman, M. J. (1988). *Local Organizations : Intermediaries in Rural Development*. Ithaca: Cornell University Press. <https://doi.org/10.2307/3324656>
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Edisi Kedu). Jakarta: Bumi Aksara.